

DAFTAR PUSTAKA

- Arens & Loebbecke. (1996). *Auditing Pendekatan Terpadu. "tr by" Amir Abadi Yusuf*. Salemba Empat: Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darius. (2006). *KUHPERDATA Buku III*. Alumni: Bandung
- Darmawanta, Hero. (2001). *Kajian Terhadap Penerapan Fixed Price Lumpsum Contract Pada Proyek Rehabilitasi Bangunan Gedung Milik Negara*. Tesis Pascasarjana. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta
- Frederika Ariany., I Gusti Ngurah Oka Suputra, dan Putu Sukma Wahyuni. (2008). *Analisa Perbandingan Kontrak Lumpsum Dengan Kontrak Unit Price Menggunakan Metode Decision Tree*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. Fakultas Teknik Sipil Universitas Udayana: Denpasar.
- Hariyanto, Erie. (2009). "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," Jurnal Al-ihkam, Vol.4, No.1.
- Hartman, Francis dan Patrick Snelgrove (1996). *Risk Allocation in Lump-Sum Contracts-Concept of Latent Dispute*. Journal of Construction Engineering and Management. American society of civil engineers.
- Haryanto, Widi. Andreawan Setyo Nugroho, dan Sugiyarto. (2016). *Analisa Perbandingan Risiko Kontrak Lumpsum Dan Unit Price Dengan Metode AHP*. Jurnal Matriks Teknik Sipil. Fakultas Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Komandoko, Gamal dan Handri Raharjo. (2009). *75 Contoh surat perjanjian (surat kontrak)*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana prenada media group: Jakarta.
- Sasmita, K. J. (2018). *Analisis Penerapan Kontrak Design and Build Pada Proyek Rehab Total Gedung Sekolah Wilayah Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Subeti, R dan R. Tjintrosudibio. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita: Jakarta
- Soeroso, R. (1999). *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Alumni: Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suwandi, Putri Anggi Permata. (2010). *Kajian manajemen risiko pada proyek dengan sistem kontrak Lumpsum dan sistem kontrak unit price (studi kasus pada proyek jalan dan jembatan, gedung, bangunan air)*. Tesis Pascasarjana. Universitas Diponegoro: Semarang.

Syaifudin, Muhammad. (2012) *Hukum Kontrak*. Mandar Maju: Jakarta

Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Wibowo Parbianto, Ummu hilmy, dan Djumikasih. (2014). *Penyelesaian sengketa antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hal perbedaan interpretasi klausul kontrak tentang perubahan design konstruksi bangunan*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum universitas Brawijaya: Malang.

Widjaya, I.G Rai. (2002). *Merancang suatu kontrak dengan teori dan praktek*. Megapoin: Jakarta.

Yasin, Nazarkhan. (2004). *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23E tentang *BPK*

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 1 tentang *BPK*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang *Jasa Konstruksi*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Jasa Konstruksi*.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 Tentang *Perjanjian*

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)*

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 Tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

